

RECOVERY EKONOMI INDONESIA DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Anita Rahmawaty*

Abstrak

Proses pemulihan (*recovery*) ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 berjalan lambat, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampak krisis ekonomi. Meskipun beberapa agenda pemulihan ekonomi Indonesia sudah ditempuh, seperti (1) mengembalikan stabilitas makro ekonomi; (2) melanjutkan reformasi struktural; (3) merestrukturisasi sistem perbankan; (4) menyelesaikan masalah hutang swasta; dan (5) mengurangi dampak krisis pada penduduk miskin melalui pelaksanaan JPS (Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*), namun ternyata tidak berkesinambungan dan terputus di tengah jalan.

Bahkan pada awal tahun 2008, kita perlu mewaspadaikan datangnya krisis pangan dan energi. Krisis sumber energi dan bahan pangan yang menyerpa akhir-akhir ini berdampak pada semakin mahalannya harga pangan bergizi. Hal ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di tengah persaingan antarbangsa yang semakin kompetitif. Daya beli masyarakat terus menurun seiring dan diperkirakan penduduk miskin akan bertambah hingga 56 juta jiwa akibat kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Sementara itu, tanda-tanda krisis pangan telah terlihat sejak awal tahun 2008 dengan naiknya harga-harga sembako, seperti kedelai, tahu-tempe hingga beras dan cabe rawit merah. Masyarakat yang sebagian besar miskin sangat terpuak menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok yang makin mencekik.

Tulisan ini mencoba mengelaborasi dan menganalisis problematika krisis pangan dan dampaknya di Indonesia, membincang beberapa faktor penyebabnya dan mencari solusi dalam rangka *recovery* ekonomi Indonesia dalam mengatasi krisis pangan dalam perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Recovery ekonomi Indonesia, krisis pangan, ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Solusi neo-liberal yang ditempuh dunia untuk mengatasi krisis ekonomi, ternyata hanya mempertinggi dan memperlebar skala krisis. Spektrum dan dimensi krisis ekonomi pun telah secara agresif bergerak ke berbagai penjuru dan bidang-bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer masyarakat dunia. Krisis telah mengunci miliaran rakyat miskin di dunia dalam kesengsaraan,

* Penulis adalah Dosen STAIN Kudus, sekarang sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kekerasan dan perang, wabah penyakit, dan keterbelakangan budaya. Fakta-fakta tentang krisis ekonomi yang terhampar di berbagai laporan media massa maupun laporan-laporan penelitian dari organisasi-organisasi di tingkat nasional maupun internasional semakin menegaskan perlunya koreksi fundamental atas tata-ekonomi dan politik dunia (INFID, 2008: 1).

Masih segar dalam ingatan kita, berbagai fakta krisis ekonomi, khususnya krisis pangan yang melanda masyarakat di Indonesia, seperti bulan Maret yang lalu di Kabupaten Rote Ndao telah ditemukan 157 balita menderita gizi buruk, 56 anak dinyatakan sudah masuk tahap marasmus, dan tiga orang balita meninggal dunia di RSUD Rote Ndao (Kompas, 9 Maret 2008). Kasus ini sebenarnya merupakan tamparan bagi pemerintah setempat, mengingat Rote Ndao sebenarnya merupakan salah satu lumbung beras untuk Propinsi NTT. Penderita gizi buruk ditemukan di Kabupaten Brebes dan di Kabupaten Magetan, sedikitnya 243 warga yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan terserang kasus gizi buruk, bahkan diberitakan oleh WFP (Program Pangan Dunia) Indonesia bahwa 13 (tiga belas) juta balita di Indonesia menderita kekurangan gizi yang kronis (Berita UNIC, 2007). Selain berita-berita tersebut, berita-berita lain telah menyebutkan bagaimana keluarga-keluarga miskin di berbagai wilayah terpaksa mengkonsumsi nasi aking (www.indosiar.com/news/hati-nurani/58012_kami-makan-nasi-aking). Ada juga berita yang menyebutkan mengenai tingginya laju anak putus sekolah yang kemudian menjadi gelandangan di kota-kota, dan sederetan berita-berita mengesankan lainnya.

Realita di atas menggambarkan bahwa krisis pangan telah menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, diantaranya meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Krisis pangan sebagai kombinasi dari berbagai krisis dalam tubuh perekonomian dunia menjadi bukti empiris gagalnya skenario neo-liberalisme-globalisasi. Skenario neo-liberal yang dalam rentang sepuluh tahun terakhir dilaksanakan secara sempurna di Indonesia meningkatkan kualitas krisis pada level yang jauh lebih berat. Bagi Indonesia, krisis kali ini menunjukkan lemahnya pondasi pokok kedaulatan nasional, khususnya kedaulatan energi dan kedaulatan pangan (INFID, 2008: 4).

Berangkat dari problematika krisis pangan yang melanda Indonesia, tulisan ini akan mengelaborasi lebih dalam mengenai *recovery* ekonomi Indonesia dalam mengatasi krisis pangan dalam perspektif ekonomi Islam. Tulisan ini diawali dengan uraian tentang kondisi makro ekonomi Indonesia 2008, problematika krisis pangan dan dampaknya di Indonesia, membincang faktor-faktor penyebab krisis pangan, kritik terhadap kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia dan diakhiri dengan upaya *recovery* ekonomi Indonesia dalam mengatasi krisis pangan dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 2008

Perekonomian Indonesia secara makro, baik dan kondusif. Selain posisi APBN 2007 aman, defisit keuangan juga lebih kecil dari yang diperkirakan. Kondisi ini memberikan modal optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,5 % sejalan dengan membaiknya investasi swasta, pulihnya daya beli masyarakat seiring dengan menurunnya tingkat suku bunga di semester kedua tahun 2007 dan tetap terjaganya inflasi pada kisaran 6 dan 7 %. Sedangkan prospek pencapaian inflasi untuk tahun 2008 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2007, yaitu berada di kisaran 5,1 % yang didukung oleh tetap terkendalinya permintaan dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah (www.pkesinteraktif.com, 4 April, 2008).

Data empiris menurut Laporan Bulanan Ekonomi bulan Februari 2008 tercatat bahwa angka inflasi bulan Februari 2008 sebesar 0,65 %, lebih rendah dibandingkan angka inflasi bulan Januari 2008. Namun secara kumulatif inflasi pada periode Januari-Februari 2008 sudah mencapai 2,44 % yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2003. Dengan inflasi *year on year* yang mencapai 7,4 %, maka ancaman inflasi yang lebih tinggi selama tahun 2008 bukanlah suatu hal yang mustahil.

Hal ini disebabkan oleh akibat tingginya harga minyak dunia yang bisa membawa kepada kenaikan harga BBM dalam negeri dan akibat kenaikan harga komoditi dunia dan terbatasnya produksi dalam negeri. Pemicu utamanya adalah harga berbagai komoditas, terutama kelompok makanan, yang terus meningkat

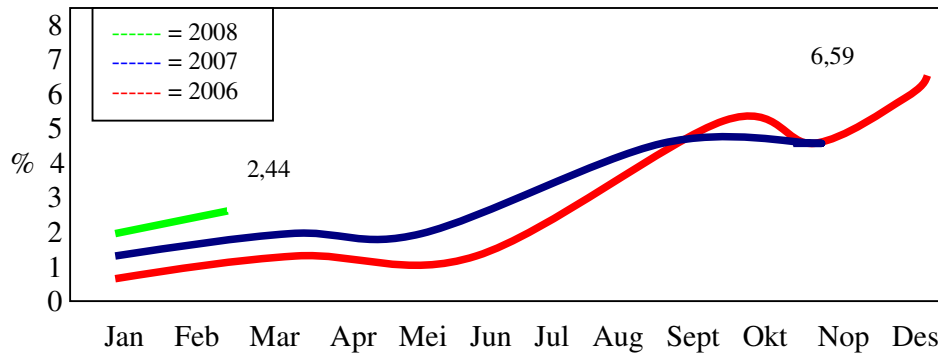
secara signifikan. Hal ini tercermin dari inflasi di kelompok bahan makanan yang mencapai 1,59 % serta inflasi di sub kelompok makanan jadi yang mencapai 1,04%. Hal ini berarti sekitar 80 % dari inflasi bulan Februari 2008 disebabkan oleh naiknya harga makanan. Fenomena meningkatnya harga komoditas makanan ini juga terjadi di beberapa negara lain.

Selain itu, sebenarnya persoalan utama pada perekonomian nasional adalah belum bergerakinya sektor produksi riil secara memadai. Keterbatasan investasi dan belum adanya insentif yang menarik bagi kegiatan berusaha menjadikan kegiatan di sektor produksi berjalan terseok-seok. Yang dibutuhkan saat ini tidak lagi sekedar kebijakan dalam bentuk wacana-wacana, tetapi implementasi kebijakan secara riil (Rusman, 2008).

Kebijakan stabilisasi pangan yang mencakup lima komoditas strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti beras, minyak goreng, kedele, terigu dan minyak tanah sampai saat ini belum memberi dampak secara signifikan dalam penurunan inflasi pada kelompok makanan. Harga beberapa komoditi tersebut ternyata masih mengalami kenaikan yang relatif tinggi, seperti minyak goreng, terigu, mie (dengan bahan baku terigu), tahu dan tempe (kedele) yang memberikan sumbangan sebesar 0,20 % terhadap inflasi bulan Februari 2008. Dengan demikian dari inflasi Februari 2008 sebesar 0,65 %, maka sekitar 0,20 % merupakan inflasi yang terjadi pada minyak goreng, terigu, mie, tahu serta tempe. Sedangkan pada komoditi beras dan minyak tanah terjadi deflasi yang cukup signifikan (Rusman, 2008).

Berikut ini gambaran inflasi kumulatif sejak tahun 2006-2008.

Tabel 1.
Inflasi Kumulatif %
2006-2008



Sumber: Kadin, Laporan Ekonomi Bulanan, Feb 2008.

C. Problematika Krisis Pangan dan Dampaknya di Indonesia

1. Krisis Pangan Dunia dan Reaksi Indonesia

Sejak Januari 2008, di berbagai negara di dunia dilanda krisis minyak bersamaan dengan krisis pangan. Sama halnya dengan harga minyak yang akhir-akhir ini terus meningkat, krisis pangan juga diperkirakan menandakan telah lewatnya masa harga pangan yang rendah yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa yang lalu. Di lain pihak, berbeda dengan krisis minyak yang memang telah diketahui akan secara cepat atau lambat muncul mengingat telah tuanya sumur-sumur minyak dunia dan tidak ditemukannya ladang-ladang minyak baru, krisis pangan datangnya hampir secara tak terduga sehingga Josette Sheeran menganalogkan fenomena krisis pangan ini sebagai suatu “*silent tsunami*”.

Gejolak politik akibat kenaikan harga telah terjadi di berbagai kawasan dunia. Di Haiti, gelombang protes warga akibat kenaikan harga kebutuhan pokok telah memaksa pemerintahan setempat untuk meletakkan jabatan. Gelombang protes massa pun membayangi kawasan-kawasan dunia lainnya. Di Zimbabwe, krisis harga yang bertemu dengan momentum krisis politik dalam pemilu setempat telah memicu aksi-aksi kekerasan terhadap oposisi. Sementara di Indonesia, kegelisahan yang tak berkesudahan akibat

kenaikan harga pangan sudah mulai diaktualisasikan dalam aksi-aksi politik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan kaum tani (INFID, 2008: 2).

Di Indonesia, tanda-tanda krisis pangan telah terlihat sejak awal tahun 2008, harga-harga sembako terus merangkak naik mulai dari harga kedelai, tahu-tempe hingga beras dan cabe rawit merah. Masyarakat yang sebagian besar miskin sangat terpukul menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok yang makin mencekik. Berbagai peristiwa memilukan telah terjadi akibat kemelaratan akut ini (Muttaqin, www.prp-indonesia.org).

Bila dikaji dari struktur permasalahannya, krisis pangan yang melanda dunia saat ini merupakan akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi dalam struktur perekonomian dunia saat ini. Krisis pangan dunia sebenarnya tidak bisa terlepas dari krisis energi akibat meningkatnya harga minyak mentah dunia yang belakangan menembus level US\$117 per barrel. Kenaikan harga minyak dunia ini diakibatkan karena adanya tekanan permintaan dan spekulasi dari pemegang dana perusak. Dana tersebut oleh Paul B Farrel, analis pasar AS di situs MarketWatch edisi 25 Februari 2008 disebut sebagai dana perusak (*toxic derivatives*). Dana sebesar US\$ 516 triliun yang sebelumnya beredar di bursa saham itu beralih ke pasar komoditi menyusul ambruknya bursa valuta dan surat berharga AS akibat “*subprime mortgage*”.

Kenaikan harga minyak yang melambung sangat tinggi menyebabkan lahirnya trend baru dalam konsumsi energi, yaitu beralihnya penggunaan minyak mentah atau energi fosil ke *bio-fuel*. Akibatnya tekanan permintaan pada komoditi bahan baku *biofuel* semakin meningkat. Dengan cepat, tekanan permintaan atas bahan baku tersebut berdampak pada ketersediaan bahan pangan dunia, sebab bahan baku *bio-fuel* (gandum, jagung, kedelai, tebu, dan sawit) adalah komponen-komponen bahan pangan yang penting bagi masyarakat dunia. Bila dilihat dari postur permasalahan yang demikian rumit, krisis harga pangan saat ini diperkirakan akan sangat sulit diatasi bila pemerintah tidak segera mengarahkan kebijakan ekonominya pada kepentingan dalam negeri dan tidak menggiring masuk

terlalu dalam pada spekulasi dan perjudian ekonomi internasional (INFID, 2008: 2).

Berbagai bentuk krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini, sesungguhnya mempersulit kondisi perekonomian Indonesia. Dampak terberat krisis ekonomi dunia saat ini diakibatkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang selalu menciptakan rekor tertinggi dalam setiap perkembangannya. Terakhir, harga minyak mentah dunia mencapai US\$ 117 yang berarti telah jauh melampaui asumsi APBN Perubahan 2008 yang hanya mematok harga US\$ 80 per barrel dan sangat jauh dari asumsi APBN sebelumnya yang hanya mematok harga US\$ 60 per barrel.

Pada saat mengubah asumsi harga minyak dalam APBN, dari US\$ 60 per barrel menjadi US\$ 80 per barrel, defisit APBN 2008 beban anggaran membengkak sebesar Rp 54 triliun dan defisit APBN melebar hingga melebihi Rp 107 triliun. Berbagai solusi pun coba diketengahkan. Target penerimaan pajak misalnya, ditargetkan naik 26,6 persen, dari Rp 426,23 triliun menjadi Rp 523,85 triliun. Pos-pos pendapatan pemerintah dari pendapatan non-pajak pun digenjot yang salah satunya melahirkan peraturan presiden tentang penyewaan hutan lindung, PP No. 02/tahun 2008, yang banyak dikecam oleh kelompok-kelompok lingkungan di Indonesia. Pendapatan dari ekspor pun ditingkatkan, salah satunya dengan mengumumkan rencana ekspor beras melalui Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 (INFID, 2008: 2).

Akibat krisis ini, beban hutang pemerintah bertambah hingga Rp 97,74 triliun (Kompas, 15 April 2008). Besarnya beban APBN dan tingginya hutang mendorong Bank Dunia untuk mendesak agar Indonesia mencabut berbagai subsidi. Pada saat ini, inflasi harga-harga kebutuhan pokok di berbagai kota, sebenarnya telah melampaui rata-rata inflasi nasional. Dorongan untuk terjadinya inflasi yang lebih tinggi juga kemungkinan akan segera terjadi menyusul reaksi para pedagang atas pengumuman pemerintah yang akan mengeksport beras yang memborong cadangan beras dari penggilingan dan petani. Karena penimbunan oleh para pedagang, pasokan

beras ke pedagang eceran diperkirakan akan berkurang dan bila hal itu terjadi, harga beras akan kian melambung di atas kemampuan daya beli rakyat (INFID, 2008: 3).

2. Dampak Krisis Pangan dalam Perekonomian

Kegawatan krisis pangan saat ini dapat digambarkan oleh beberapa data statistik. Menurut Josette Sheeran (Kepala WFP/World Food Program) kenaikan harga pangan, meskipun akan mempengaruhi semua tingkat pendapatan, namun akan lebih dirasakan oleh kelompok pendapatan rendah. Bagi kelompok pendapatan menengah kenaikan harga pangan akan menyebabkan golongan penduduk ini mengurangi pengeluaran rumah tangganya untuk keperluan kesehatan. Namun bagi golongan yang penghasilannya hanya USD 1 per hari, kenaikan harga pangan berarti harus dihentikannya pengeluaran rumah tangganya untuk konsumsi daging dan sayuran. Statistik tentang gawatnya krisis pangan ini juga terlihat pada tingkat kenaikan harga pangan selama setahun terakhir ini. Sampai dengan Maret 2008 peningkatan harga gandum adalah 130%, kedelai 87%, jagung 31% dan beras 74%.

Krisis pangan adalah momentum ketika laju dehumanisasi bergerak kian tidak terkendali. Rakyat miskin dan marjinal dipaksa bekerja lebih lama dan beban kerja yang lebih berat, dalam keadaan kerja yang lebih buruk, namun hanya mendapatkan imbalan yang seadanya dan sangat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Laju dehumanisasi ini kian diperburuk oleh kebijakan-kebijakan neoliberal yang semakin menjauhkan rakyat dari sarana-sarana pelayanan kesehatan yang memadai, perumahan dan sanitasi yang layak, pendidikan yang murah dan berkualitas, serta berbagai sarana lain yang menopang kepentingan ekonomi, sosial-politik, dan pengembangan kebudayaannya (INFID, 2008: 4).

Kondisi krisis pangan dunia ini telah disuarakan oleh berbagai tokoh dunia. Robert Zoellick, *Direktur World Bank* memperingatkan bahwa *"The rapid rise in food prices could push 100 m people in poor countries deeper*

into poverty". Krisis bahan pangan yang menerpa ini juga akan berdampak pada semakin mahalnya harga pangan bergizi. Hal ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di tengah persaingan antarbangsa yang semakin kompetitif. Daya beli masyarakat terus menurun seiring dan diperkirakan penduduk miskin akan bertambah hingga 56 juta jiwa akibat krisis harga pangan tersebut (Lesmana dan Sofyan, 2008: 1).

Bagi kaum buruh Indonesia, krisis telah melemparkan mereka ke dalam masa-masa sebelum tahun 1886. Masa-masa ketika para buruh bekerja dalam waktu yang hampir tidak terbatas, tanpa jaminan kerja dan kesehatan, tanpa kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan, dengan penghasilan yang tidak seberapa dan jauh dari mencukupi. PHK menjadi ancaman yang datang hampir setiap hari. Semua ini disebabkan akibat bangkrutnya struktur industri manufaktur ringan dan kian tajamnya krisis akibat overproduksi dan melambungnya biaya produksi pada level nasional maupun internasional.

Bagi kaum tani Indonesia, krisis telah memaksa mereka bekerja dalam keadaan yang serba spekulatif. Liberalisasi yang menggempur sendi-sendi pertanian menyebabkan melemahnya daya tolong pertanian bagi kehidupan ekonomi kaum tani. Swastanisasi industri pupuk dan desakan-desakan untuk menggunakan bibit-bibit unggul hasil rekayasa genetika telah mengancam aspek produksi pertanian Indonesia. Sementara, tidak adanya standar harga yang baku dan konsisten dari pemerintah serta belum adanya sarana dan prasarana yang menjamin adanya tata niaga yang adil menyebabkan lemahnya nilai tawar produk pertanian dari petani kepada pedagang (INFID, 2008: 5).

Perempuan dan anak-anak dari keluarga-keluarga miskin menjadi kalangan yang paling menderita akibat krisis ekonomi. Kalangan ini tidak hanya dibebani oleh membumbungnya harga-harga melainkan juga diperparah oleh berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Demikian pula bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Krisis telah melangkitkan biaya

pendidikan yang menghambat pemenuhan akses atas sarana pokok pengembangan kebudayaan dan penempatan tenaga kerja yang bisa membekali kehidupannya. Setiap tahun jutaan orang dalam usia produktif terlempar dari lapangan kerja dan terjerembab dalam pengangguran dan kriminalitas. Di sisi lain tidak sedikit dari anak-anak usia sekolah yang terlempar dari dunia pendidikan, mengisi jalanan dan lorong-lorong perkotaan, bekerja dalam keadaan yang terburuk, kondisi yang membahayakan keselamatan, mengancam kesehatan, menghambat pertumbuhan, atau merusak kejiwaan (INFID, 2008: 5).

D. Membincang Faktor Penyebab Krisis Pangan di Indonesia

Kondisi krisis pangan dunia ini seakan membenarkan pernyataan ekonom klasik, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam bukunya *An Essay on the Principle of Population* yang diterbitkan pada 1798. Malthus menyebutkan bahwa pertambahan populasi penduduk akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan produksi bahan pangan (Lesmana dan Sofyan, 2008: 1).

Kenaikan harga pangan yang terjadi ini begitu tinggi dan datang secara tiba-tiba serta krisis pangan ini diperkirakan akan berlangsung lama. Jika dianalisis lebih dalam, maka sebenarnya krisis pangan ini terkait dengan masalah struktural yang solusinya harus diupayakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat beberapa faktor penyebab krisis pangan yang dapat diklasifikasikan dalam penyebab jangka pendek dan jangka panjang (Muttaqin, www.prp-indonesia.org), yaitu:

Penyebab Jangka Pendek adalah krisis pangan tersulut oleh terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran jagung dunia terkait dengan program pengembangan *bio-fuel*. Penyulut (*trigger*) ini terjadi pada saat telah berlangsungnya beberapa sebab lain, seperti pemanasan global yang telah menyebabkan kekeringan dan gagal panen gandum di Australia, dan beralihnya para petani di Australia dari menanam padi, yang banyak membutuhkan air, ke menanam anggur yang melalui teknik “*dripping*” menggunakan air jauh lebih sedikit. Khusus pada triwulan pertama 2008 beberapa negara produsen beras yang

secara tradisional surplus dan menjadi pengeksport beras dunia telah memutuskan untuk menghentikan atau paling tidak membatasi penjualan beras mereka ke pasar dunia. Situasi yang semakin ketat antara permintaan dan penawaran beras dunia ini kemudian diperparah lagi oleh adanya aksi spekulasi beras baik di negara produsen yang surplus (seperti Thailand dan Vietnam) maupun di negara-negara yang biasanya menjadi negara pengimpor beras.

Penyebab Jangka Panjang adalah terletak pada upaya menghilangkan distorsi pasar yang menyebabkan kesenjangan antara penawaran pangan (beras) dan permintaannya tidak dapat menemukan keseimbangannya. Dalam pasar yang relatif tidak terdistorsi setiap kenaikan harga pangan/beras akan ditanggapi oleh para petani dengan meningkatkan produksinya sehingga harga akan kembali menurun. Hal ini terjadi bagi para petani besar di AS dan Eropa yang memang telah menaikkan produksinya. Namun hal ini tidak terjadi pada para petani kecil di negara-negara yang sedang berkembang. Ketika harga pangan (beras) naik, mereka tidak cenderung untuk menaikkan produksinya. Beberapa sebab struktural dari kurang/tidak tanggapnya para petani kecil ini (Muttaqin, www.prp-indonesia.org), antara lain adalah:

Pertama, berkurangnya lahan pertanian karena proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan infrastruktur, seperti jalan tol atau pun perumahan. Hal ini dapat dilihat di kawasan Jabodetabek. Di kawasan ini, pertumbuhan progresif pembangunan infrastruktur menggerus lahan pertanian. Bahkan lebih parah lagi, pembangunan jalan tol yang akan dibangun tak segan-segan menerjang kawasan lahan pertanian tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan setelah ada jalan tol yang melintang membelah kawasan pertanian dari Jakarta hingga Jawa Barat. Bagaimana sistem pengairan bisa teratur jika saluran irigasinya terpisah jalan tol? Bagaimana akses para petani penggarap tidak terganggu jika seberang yang satu dengan seberang lainnya tak bisa dilewati karena tak boleh menyeberang di jalan tol, padahal sawah yang terpisah itu bisa jadi pemiliknya sama?

Kedua, sektor pertanian kurang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai bukti, antara tahun 1980 dan 2004 alokasi

dana pembangunan pemerintah untuk pertanian telah menurun sebesar 50%, padahal upaya peningkatan bibit baru harus berlangsung secara terus menerus mengingat suatu bibit baru harus dapat terus menyesuaikan mengingat adanya jenis hama dan penyakit tanaman yang terus berkembang;

Ketiga, pemilikan lahan pertanian oleh petani cenderung menurun dari rata-rata 1,5 hektar pada tahun 1990 menjadi rata-rata 0,5 hektar per petani. Hal ini telah menyebabkan biaya produksi per hektar cenderung tinggi, sehingga petani tidak mempunyai cukup insentif untuk menaikkan produksi meskipun harga pangan meningkat;

Keempat, Perubahan iklim. Perubahan iklim yang makin tak terprediksi disebabkan pemanasan global. Penggundulan hutan adalah penyebab utamanya disamping sisa buang gas karbon monoksida yang semakin bertambah tiap hari dari kendaraan bermotor dan pabrik. Petani di Jawa awal akhir tahun 2007 dan awal 2008 telah merasakan sendiri bagaimana tak pastinya musim. Menjelang akhir tahun 2007, banyak petani gagal panen karena musim panas terlalu lama. Setelah menanam kembali memasuki musim hujan, justru hujan berlebih yang didapatkan sehingga banjir hampir menggenangi sebagian besar Jawa selama sebulan lebih.

Kelima, mekanisme pasar akan berjalan baik jika semua pelaku mempunyai informasi lengkap yang sama tentang situasi permintaan dan penawaran. Dalam realitanya, para petani kecil di negara-negara berkembang, umumnya, tidak mempunyai akses atas informasi tentang situasi harga pasar di tingkat pedagang grosir dan eceran dalam negeri, apalagi pada tingkat pedagang luar negeri. Karena berbagai sebab ini para petani kecil, yang produksinya seharusnya menjadi basis peningkatan produksi pangan (beras) dunia secara berkelanjutan, tidak dapat tanggap atas kenaikan harga pangan dunia. Hal ini berarti bahwa selama berbagai distorsi pasar bagi petani kecil ini tidak dibenahi maka krisis pangan yang mulai meledak sejak awal tahun 2008 akan berlangsung dalam periode transisi yang agak panjang, sebelum dapat mencapai equilibrium baru yang menghasilkan keseimbangan yang langgeng antara penawaran dan permintaan pangan dunia. Hal ini juga berarti bahwa krisis pangan dunia yang

terjadi pada awal tahun 2008 akan berlanjut terus minimal sampai lima tahun ke depan.

E. Kritik Terhadap Kebijakan Liberalisasi Ekonomi di Indonesia

Di Indonesia, paham neo-liberalisme mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, berupa paket deregulasi sejak tahun 1983. Sejak itu, pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberalisme, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, IMF, Bank Dunia dan WTO.

Indonesia semakin terjatuh dalam sistem ekonomi kapitalis neo-liberalisme semenjak terjebak dalam siklus pembayaran hutang yang tiada habis, korporasi atau modal asing semakin mendominasi perekonomian Indonesia melalui penguasaan terhadap asset strategis, cabang produksi (BUMN) dan industri di berbagai sektor. Di lain pihak, beralih bergabung dengan WTO untuk meningkatkan perdagangan dunia, justru Indonesia dibebani dengan berbagai peraturan yang merugikan kepentingan nasional, seperti penghapusan tarif, subsidi, dan larangan proteksi ekonomi domestik, yang sebenarnya dilakukan sendiri oleh negara maju (Hamid, 2007).

Liberalisasi keuangan dan perdagangan yang diterapkan Indonesia, khususnya sejak krisis ekonomi 1997, menyebabkan Indonesia kian terpuruk dalam dilemma neo-liberalisme. Liberalisasi perdagangan yang ditawarkan untuk menjadi solusi bagi rendahnya produktivitas nasional, ternyata hanya membawa efek negatif bagi perbaikan perekonomian nasional. Produk-produk dalam negeri terjebak dalam persaingan yang tidak seimbang melawan *dumping* barang-barang impor. Liberalisasi perdagangan, khususnya pada sektor pertanian, telah membawa dampak yang jauh lebih buruk dibandingkan masa-masa sebelum krisis ekonomi. Akibat dari liberalisasi tersebut, kapasitas sektor pertanian Indonesia untuk meredam gejala krisis semakin melemah. Dengan begitu, ancaman yang muncul tidak hanya pada aspek pendapatan negara, melainkan juga pada wilayah ketersediaan pangan dalam negeri (INFID, 2008: 1).

Krisis pada wilayah sektor riil tentu saja berdampak pada sektor keuangan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak pernah mampu menyusun dan menerapkan kebijakan fiskal yang konsisten. Hampir setiap tahun, rencana anggaran belanja negara selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan lain akibat liberalisasi keuangan, yakni paksaan untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar dan indeks harga saham.

Liberalisasi keuangan dan perdagangan adalah dua komponen pokok paket liberalisasi menjalar luas ke berbagai bidang kehidupan akibat globalisasi. Liberalisasi dan globalisasi sesungguhnya tidak pernah mampu mengatasi krisis ekonomi, sebaliknya malah mempertinggi krisis overproduksi dan memperluas kemiskinan dan penurunan daya beli. Dengan demikian, liberalisasi itu sendiri sebenarnya tidak lebih dari mekanisme transfer beban ekonomi dari negara-negara industri maju ke negara-negara miskin dan terbelakang. Iming-iming liberalisasi, seperti efisiensi dalam produksi dan distribusi ternyata tidak pernah terbukti, justru yang terjadi semakin panjangnya rantai distribusi dan semakin lemahnya kemampuan produksi. Aktualisasi liberalisasi yang pada intinya mendorong perluasan akses terhadap pasar dan sumberdaya alam dan tenaga kerja dari negara-negara miskin (INFID, 2008: 2).

Namun di penghujung tahun 1990-an gerakan berlawanan arah dengan kecenderungan globalisasi justru yang menguat. Globalisasi mulai terus digugat dan dikecam oleh banyak negara karena impian untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan penghapusan kemiskinan ternyata tidak terwujud, justru melahirkan ketimpangan negara kaya-miskin semakin besar dan menciptakan ketidakadilan. Gugatan terhadap globalisasi dan perangkatnya tidak hanya datang dari negara berkembang, melainkan juga oleh negara-negara yang berpendapatan menengah, seperti Amerika Latin (Hamid, 2005: 118).

Kecaman keras terhadap liberalisasi saat ini juga muncul dari ekonom dunia, Joseph E Stiglitz bahwa liberalisasi finansial yang dipasarkan IMF tidak tepat untuk negara berkembang. Ia mengkritik IMF telah melakukan kekeliruan karena menerapkan pasar bebas untuk suatu negara yang struktur informasi, struktur pasar dan infrastruktur kelembagaannya belum lengkap.

Secara teoritik memang perdagangan bebas dunia akan dapat mendorong terjadinya peningkatan efisiensi melalui spesialisasi produk. Namun realisasinya, justru tujuan liberalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak terwujud karena suatu kenyataan bahwa kekuatan antar negara yang berkompetisi bebas ini tidak seimbang, padahal ini merupakan syarat utama untuk mewujudkan terjadinya situasi yang saling menguntungkan dari adanya liberalisasi ekonomi tersebut. Dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang tersebut, maka persaingan cenderung dimenangkan oleh negara yang kuat, baik dalam sumberdaya manusia, kapital maupun teknologi (Hamid, 2005: 119-121).

Saat ini merupakan momentum penting bagi seluruh kalangan masyarakat yang selama ini telah secara kritis dan aktif melakukan kritik terhadap neo-liberalisme, rejim perdagangan bebas, dan kekuasaan yang tidak terhingga dari perusahaan-perusahaan internasional yang selama ini mengeruk keuntungan dari penderitaan rakyat Indonesia. Krisis yang terjadi ini telah mendukung seluruh argumentasi-argumentasi yang menolak kediktatoran Bank Dunia, IMF, WTO dan institusi-institusi lain di kancah internasional yang berperan sebagai regulator perekonomian dunia. Krisis ini juga telah membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk menggelorakan tuntutan-tuntutan perubahan secara terbuka karena seluruh argumentasi pro neo-liberalisme, yang sebelumnya digunakan oleh para intelektual kanan dan penguasa telah gugur dan tidak lagi memiliki pijakan kenyataan yang kokoh.

F. Upaya *Recovery* Ekonomi Indonesia dalam Mengatasi Krisis Pangan: Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai negara agraris, potensi perekonomian Indonesia pada sektor pertanian sangatlah besar. Sekitar 70% produk domestik bruto Indonesia saat ini dibangkitkan dari konsumsi dalam negeri yang sebagian besar disumbang dari sektor konsumsi pangan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia juga bekerja di sektor produksi pangan. Karena itu, pangan menjadi sektor penggerak utama (*growth pole*) ekonomi Indonesia. Rakyat Indonesia yang berjumlah besar akan menjadi kekuatan ekonomi jika kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari hasil

pertanian dalam negeri, dan akan menjadi pendorong konsumsi. Untuk itu, pemilihan *growth pole* semestinya ditekankan pada sektor konsumsi pangan, mengingat pangan adalah penggerak utama ekonomi dan penyerap sebagian besar tenaga kerja (Santoso, 2003).

Krisis pangan yang kian memburuk di Indonesia saat ini telah memberikan argumentasi kritis terhadap kebijakan neo-liberalisme. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi dan memformulasikan solusi-solusi fundamental untuk keluar dari krisis pangan berdasarkan temuan faktor-faktor penyebab krisis pangan.

Islam menawarkan solusi, setidaknya untuk menghindari terjadinya krisis yang tajam selama perekonomian sedang mengalami kelesuan. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya stabilisator otomatis jika terjadi gangguan dalam perekonomian. Zakat, merupakan instrumen fiskal utama dalam ekonomi Islam sebagai stabilisator otomatis bagi perekonomian yang mengalami gejolak.

Yusoff dalam Jusmaliani, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran zakat harus ditingkatkan ketika perekonomian mengalami penurunan (*downswing*) untuk mendorong pengeluaran agregat dan aktivitas ekonomi. Karena adanya peningkatan jumlah penerima zakat selama kurun waktu resesi, pemerintah seharusnya mendistribusikan zakat lebih banyak dengan menggunakan kelebihan dana zakat selama periode *booming*. Sedangkan selama masa ekspansi dari siklus ekonomi, pemerintah boleh mengurangi pengeluaran zakat untuk menjaga terjadinya *overheating*. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi komponen kebijakan stabilisasi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dan pajak (Jusmaliani, dkk, 2005: 94).

Di samping penerapan kebijakan fiskal dengan instrumen zakat, pajak dan pengeluaran pemerintah, untuk menciptakan kestabilan dan keseimbangan ekonomi harus ada keseimbangan antara atribut-atribut perekonomian yang oleh Ibn Khaldun digambarkan sebagai Model Dinamika Sosio-Ekonomi Syari'ah. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner

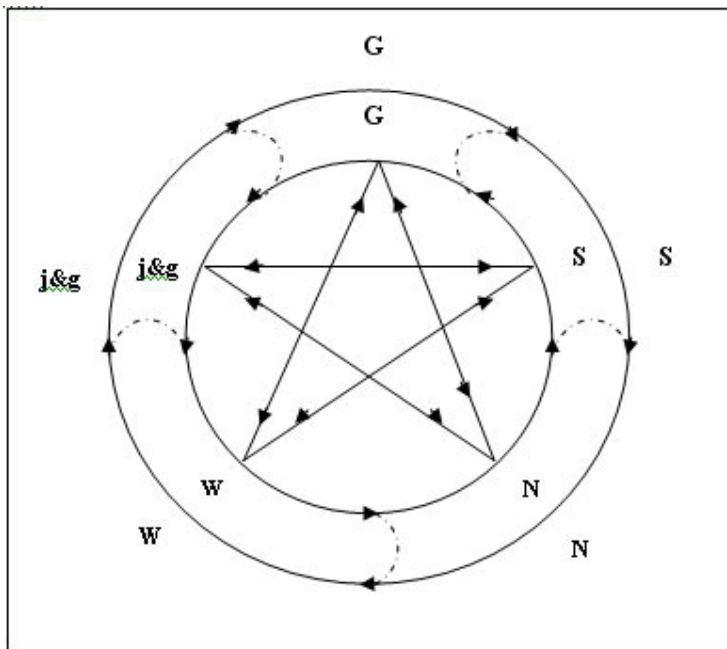
dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan (Chapra, 2002: 127).

Rumusan *Model Dinamika* atau *Dynamic Model of Islam* Ibn Khaldun (Muqaddimah, t.t: 39) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pemerintah (*al-mulk*) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah;
2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan (*al-mulk*);
3. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat (*ar-rijal*);
4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (*al-mal*);
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan (*al-'imarah*);
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (*al-'adl*);
7. Keadilan merupakan tolok ukur (*al-mizan*) yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya;
8. Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Selanjutnya, rumusan tersebut dikembangkan oleh Umer Chapra dengan model sebagai berikut:

Gambar 1
Lingkaran Model Dinamika Sosio-Ekonomi Syariah



Sumber: Chapra, 2001

Analisis Model Dinamika Sosio-Ekonomi Ibn Khaldun di atas, dapat ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Chapra (2001: 126-127) sebagai berikut: $G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)$, dimana G =kekuasaan politik atau *Governance*, S =Syariah, N =masyarakat (*Nation*), W =kekayaan (*Wealth*), g =pembangunan atau *growth* dan j =keadilan (*justice*). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan demikian, variabel-variabel sosial-ekonomi, demografi, hukum dan politik yang menentukan kesejahteraan manusia mengarah kepada kemajuan atau kemunduran suatu peradaban memiliki peranan saling terkait dan merupakan suatu kesatuan. Jika satu variabel saja rusak, maka akan membuat kesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

Dalam upaya *recovery* ekonomi Indonesia, maka variabel-variabel, seperti pemerintah, masyarakat, dan hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemulihan ekonomi suatu negara akan terwujud tergantung kepada kekuatan dan kelemahan penguasa politik yang berhasil mereka wujudkan. Penguasa politik, dalam hal ini pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah serta pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang adil.

Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi dan memformulasikan solusi-solusi fundamental untuk keluar dari krisis pangan berdasarkan faktor-faktor penyebab krisis pangan. Menurut penulis, langkah-langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, ekstensifikasi lahan pertanian harus segera diwujudkan. Hal ini lebih meningkatkan kesejahteraan petani daripada ditanami perusahaan yang tak berdampak banyak kepada petani yang tetap miskin. Dalam Islam, ekstensifikasi pertanian bisa dicapai dengan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah yang mati (Nabhani, 1996: 135). Menghidupkan tanah mati, dalam istilah fiqh disebut "*Ihya' al-mawat'*". Pemerintah dapat memberikan tanah secara cuma-cuma kepada mereka yang mampu bertani, tetapi tidak memiliki tanah.

Dalam Islam, setiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh seseorang, maka tanah tersebut menjadi milik yang bersangkutan. Syara' telah menjadikan tanah tersebut sebagai milik orang yang menghidupkannya berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan at-Tirmidzi dari Jabir ibn 'Abdillah (Ibn Qudamah, t.t: 514) sebagai berikut:

نُ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُمْ

Kedua, sektor pertanian harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia dengan cara meningkatkan alokasi dana pembangunan untuk sektor pertanian.

Ketiga, perlindungan harga komoditas pertanian dalam negeri. Impor beras harus dihentikan ketika pasokan dalam negeri mencukupi, sehingga tak menjatuhkan harga hasil pertanian dalam negeri.

Keempat, pemerintah Indonesia harus ikut mengkampanyekan penghentian riset pengembangan *bio-fuel*. Biji-bijian pangan lebih mendesak untuk umat manusia ketimbang untuk bahan bakar mesin. Bahkan pemerintah harus ikut menggalakkan pemanfaatan energi alternatif terbaru, seperti panas surya, panas bumi, angin dan arus laut untuk energi kendaraan dan listrik.

Kelima, perbaikan sistem distribusi pangan (beras) (<http://hayatulislam.wordpress.com/2007/02/21>). Hal ini disebabkan kenaikan harga beras tidak semata-mata disebabkan oleh stok beras yang menurun, tetapi lemahnya sistem distribusi di lapangan.

Keenam, Mendudukan kembali Bulog sebagai lembaga yang menjaga kestabilan harga beras dan gabah petani. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hermanto Siregar, Direktur Akademik Manajemen dan Bisnis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor bahwa "Bulog perlu dikembalikan pada fungsi semula yaitu sebagai penjaga kestabilan harga dan pendapatan petani. Pasalnya, status Bulog sebagai perusahaan umum (Perum) selama ini memiliki motivasi meraih keuntungan (Pikiran Rakyat, 17 Februari 2007). Keenam langkah dan strategi di atas, kiranya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah, khususnya Departemen Pertanian saja, melainkan perlu penanganan dan kerjasama antara departemen.

G. Penutup

Krisis pangan telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang selama ini telah secara kritis dan aktif melakukan kritik terhadap neo-liberalisme dan rejim perdagangan bebas. Krisis ini telah mendukung seluruh argumentasi-argumentasi yang menolak kediktatoran Bank Dunia, IMF, WTO dan institusi-institusi lain di kancah internasional yang berperan sebagai regulator perekonomian dunia.

Krisis pangan ini juga telah membuka pikiran dan kesadaran bagi masyarakat untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi terbaik untuk bangkit dari krisis. Karena Islam hadir sebagai *rahmah lil alamin* dan menawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan ekonomi, termasuk didalamnya krisis pangan. Dengan demikian, sekarang ini, sudah saatnya pemerintah mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan *recovery* ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yuliawan, "Tantangan dan Prospek Bank Syari'ah 2008", didownload dari <http://www.pkesinteraktif.com>, 4 April, 2008.
- Berita UNIC Jakarta, Vol. I, No. 4, Mei 2007.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia Dari Sentralisasi Ke Desentralisasi*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- , "Modul Sistem Ekonomi", Universitas Terbuka: Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Erna Zetha Rusman, "Laporan Bulanan Ekonomi Februari 2008.
- Hayatul Islam, "Solusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Pangan", didownload dari <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/02/21/solusi-islam-dalam-mengatasi-krisis-pangan/>
- http://www.indosiar.com/news/hati-nurani/58012_kami-makan-nasi-aking
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Imam Santoso, "Penyelamatan Ekonomi dengan Strategi Swasembada Pangan", dalam *Focus*, Edisi 10, April 2003.
- INFID, "Krisis Pangan dan Energi Serta Dampaknya Bagi Kehidupan Rakyat: Merumuskan Alternatif Solusi", dalam Kerangka Acuan Diskusi Meja Bundar Masyarakat Sipil Indonesia menyambut Peringatan Hari Buruh Se-Dunia, Jakarta, 30 April 2008
- Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kompas, 15 April 2008.
- Kompas, 9 Maret 2008.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPF, 2007.

Pikiran Rakyat, 17 Februari 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Republika, 15 Februari 2007.

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Teddy Lesmana dan Ahmad Sofyan, "Bangkit di Tengah Krisis Pangan dan Energi".

Zainal Muttaqin, "Krisis Pangan, Ancaman Konflik Kemanusiaan Baru", didownload dari www.prp-indonesia.org.